

## **PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)**

**Rizky Melan Jauhari<sup>1</sup>, Erna Sulistyowati<sup>2</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

**19013010073@student.upnjatim.ac.id**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 50 responden dengan pihak pengeloladana desa yang terdiri Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

### **Abstract**

This research aims to determine the positive influence of Apparatus Competence, Use of Information Technology and Community Participation on Village Fund Management Accountability (Village Case Study in Kanigoro District, Blitar Regency).

This type of research is quantitative research with a sample size of 50 respondents with village fund management consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and BPD. This research data was collected through questionnaires, processed and analyzed using multiple regression analysis using the SPSS version 26 program. The sampling technique used was saturated samples. Meanwhile, the data analysis used is data quality testing, descriptive analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing.

**Kata kunci :** Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia pada era sekarang ini mulai memprioritaskan desa menjadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan pemerintah. Pemerintahan dari desa bisa menjadi tolak ukur dikarenakan representasi pemerintah pusat di lingkup yang paling kecil. Dalam mencapai proses tersebut, pemerintah berupaya dengan memberikan dana desa yang didapatkan dari APBN yang lebih lanjut dikelola oleh masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan memajukan pembangunan yang ada di desa. Setiap desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan mengelola pemerintahannya masing-masing. Pelimpahan wewenang tersebut menjadi dasar dari desentralisasi yaitu bentuk tata kelola pemerintahan yang mana kekuasaan dan kewenangan tidak terpusat, tetapi menyebar ke daerah-daerah lingkup kecil seperti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan juga begitu sebaliknya. (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Terbentuknya peraturan tentang desa yang diatur pada UU Nomor 6 tahun 2014 yang dirubah dalam bentuk PP Nomor 11 tahun 2019 berisi kebijakan tata kelola desa dan kebijakannya tersebut memberikan dampak yang besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Kebijakan tersebut antara lain adalah alokasi anggaran dana desa dalam jumlah yang cukup besar dan disalurkan kepada seluruh desa. Dana desa yang diberikan tersebut sudah dianggarkan pemerintah setiap tahunnya dan penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun pemerintah pusat juga membuat Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang berisikan kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada Desa secara otonom yang berfungsi untuk meletakkan dasar pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dapat dilihat selama 5 tahun yaitu dimulai dari 2015 – 2019 yang mempunyai tujuan untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan diperkuatnya pembangunan di desa. (Kemendes PDTT, 2019)

Menurut Direktorat Jendral Perbendaharaan Kemenkeu, Alokasi Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2020, alokasi dana desa yang disalurkan sebesar Rp 72 Triliun begitu juga pada tahun 2021 alokasi dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 72 Triliun. Sedangkan pada tahun 2022, dana desa yang ditetapkan sebesar Rp 68 Triliun menurun sebesar Rp 4

Triliun. Pemanfaatan Dana Desa pada tahun ini difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan sektor-sektor yang dilihat prioritas untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Suryani & Suprasto, 2021).

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Keagenan (Agency Theory)

Interaksi antara prinsip dan agen disebut sebagai teori keagenan. Prinsip inti dari teori ini adalah bagaimana hubungan kontrak kerja sama atau interaksi antara pihak yang berwenang, juga dikenal sebagai kepala sekolah, dan pihak penerima, dilambangkan dengan manajer, bekerja. Menurut teori agensi, prinsipal dan agen berada dalam konflik karena masing-masing orang hanya dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri. Karena keterbatasan kepemilikan dan kontrol perusahaan, Biaya keagenan yang terkait dengan pencegahan dan pengurangan masalah keagenan ini harus dibayar oleh prinsipal dan agen (Pahlawan et al., 2020b).

Menurut teori yang dikemukakan oleh (Indraswari & Rahayu, n.d.) , biaya agensi dapat dibagi menjadi tiga kategori: biaya ikatan, biaya pemantauan, dan kerugian residual. Kerugian residual adalah semacam loyalitas atau pengorbanan yang bermanifestasi sebagai penurunan kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari kesenjangan pengambilan keputusan antara prinsipal dan agen. Biaya pemantauan, seperti yang dikeluarkan untuk mengamati, mengukur, dan mengelola perilaku agen, merupakan biaya anggaran yang berkembang dan dijamin oleh prinsip.

Konsep teori keagenan (agency theory) menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan adanya kepentingan dalam mengoptimalkan keuntungan bagi principal. Teori keagenan dalam perusahaan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Jika diaplikasikan dalam hubungan pemerintah dan masyarakat, maka masyarakat memberikan mandat kepada pemerintah melakukan tugas-tugas yang mendatangkan keuntungan bagi masyarakat.

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam kata bahasa Inggris (account-tability) mengacu pada keadaan yang tunduk pada tanggung jawab. Karena itu, akuntabilitas mengacu pada situasi atau keadaan yang mungkin merupakan tanggung jawab. Dalam Banga (2017), Dwiyanto mengemukakan pendapat bahwa pembuat kebijakan memiliki kewajiban akuntabilitas kepada publik. Artinya, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, diperlukan pertanggungjawaban pemerintah atau eksekutif sebagai penentu kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan.

Berdasarkan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Administrasi Negara (LAN)), akuntabilitas ialah kewajiban yang memberikan pertanggungjawaban serta menunjukkan kinerja atau tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi pada pihak yang mempunyai hak serta berhak meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas mengandung unsur signifikan untuk melindungi nilai-nilai miring prediktibilitas, efisiensi, efektifitas serta reliabilitas. Sebuah akuntabilitas tidak abstrak tetapi kongkrit serta wajib diputuskan sang hukum melalui seperangkat mekanisme sangat khusus yang dapat menyangkut masalah apa yang wajib dipertanggungjawabkan (Evita Dewi & Hari Adi, 2019).

Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan artinya anugerah laporan serta pengungkapan dari aktivitas serta kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam satu kurun waktu eksklusif kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini tentunya baik buat pemerintah pusat juga pemda, wajib bisa menjadi subjek pemberi laporan dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak buat mengetahui bahwa sudah sejauh mana pemerintah memberi pelayanan publik melalui pengelolaan anggaran (Aparatur et al., 2021).

## **Kompetensi Aparatur Desa**

Dimulai dengan Kamus Webster pada tahun 1996, konsep kompetensi pertama kali muncul. Konsep ini berasal dari kata kerja Latin "competere", yang berarti "menjadi tepat". Selain itu, berbagai topik dan penelitian yang berkaitan dengan konsep kompetensi dari berbagai literatur telah muncul sebagai hasil dari perubahan pengalaman yang signifikan. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46 A Tahun 2003, Kompetensi adalah keahlian dan keistimewaan yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. kedudukannya, sehingga pegawai dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif, efisien, dan profesional.

Dalam Moehariono (2018), Hutapea dan Thoha (2008) menyatakan bahwa

kompetensi adalah pengetahuan dan komitmen untuk melaksanakan tugas seseorang dengan kemampuan yang realistis dan berguna untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Spencer dalam Moeheriono (2018), kompetensi adalah keistimewaan yang menjadi landasan awal seseorang terkait dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik fundamental yang dimiliki individu tersebut sebagai sebab akibat dengan standar yang digunakan sebagai tolak ukur dalam tampil luar biasa di tempat kerja atau dalam situasi tertentu. Pengelola dana desa harus memiliki kompetensi dan juga yang terpenting adalah akuntabilitas lokal dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. (Widyatama dan Novita, 2017)

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Warsita (dalam Pahlawan dkk, 2020:164) teknologi informasi adalah metode untuk memperoleh, mentransmisikan, memproses, menafsirkan, menyimpan, mengatur, dan menggunakan data dan infrastruktur secara sistematis (perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen pengguna). Ketika menjalankan sistem informasi komputer terintegrasi yang dimaksudkan untuk memberikan statistik dan informasi yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pada manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi sangat bermanfaat.

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2008:135). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi biasanya dimulai dengan kata bahasa Inggris partisipasi, yang berarti untuk mengambil bagian. Partisipasi juga dapat disebut sebagai partisipasi aktif atau proaktif dalam arti luas (Selekhan, 2014). Menurut Sumarto dalam Sembodo (2016), partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan peningkatan interaksi atau hubungan pemangku kepentingan, yang memungkinkan tersedianya ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi, dan awal tindakan bersama. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa kesepakatan dan tindakan inovatif akan terjadi selama proses deliberatif.

Partisipasi dalam semua aspek kehidupan sehari-hari akan berhasil jika melibatkan semua anggota masyarakat untuk mempromosikan akuntabilitas dalam menanggapi ketidakpercayaan yang meluas terhadap pemerintah. Karena pemisahan yang

lebih besar antara pemerintah dan rakyat, masyarakat dapat menjadi lebih transparan dan meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah (Mada et al., 2017).

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memakai analisis statistik SPSS

### Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan sumber data primer. Pengumpulan data saat dilakukannya penelitian ini memakai teknik survey adalah digunakannya kuesioner yang secara langsung diberikan kepada responden yang ada di desa se – Kecamatan Kanigoro. Kuesioner yang sudah terisi oleh para responden selanjutnya diseleksi dahulu supaya kuesioner yang belum memenuhi persyaratan dieliminasi. Penelitian ini menggunakan cara seperti ini karena dalam pengembangannya metode survey secara langsung memiliki keunggulan dalam keefektifan pengolahan data dan meminimalisir resiko tidak ada respon balik dari kuesioner yang telah disebar

Dalam pengisian jawaban, penulis memberikan skor tiap item jawaban dengan skala likert. Skala *Likert* alat atau cara untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dengan skala *Likert* maka variabel yang diukur kemudian dijabarkan menjadi pengukuran variabel. Kemudian jawaban setiap item yang menggunakan skala *Likert* memiliki nilai dari sangat positif sampai sangat negative, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018):

Sangat Tidak Setuju : 1

Tidak setuju : 2

Netral : 3

Setuju : 4

Sangat Setuju : 5

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner di katakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 20). Dari hasil validitas didapatkan tiga variabel, yaitu variabel Kompetensi Aparatur (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Partisipasi masyarakat (X3), akuntabilitas (Y). Nilai korelasi dibandingkan dengan dengan r tabel , r tabel dicari pada signifikan 0,5 dengan (n) = 80 atau df = 74, maka di dapat r tabel sebesar 0, 278, jika r hitung > r tabel maka angket dikatakan valid, begitu juga sebaliknya. Jika r hitung < r tabel maka angket dikatakan tidak valid.

## Uji asumsi klasik

Penelitian ini menggunakan Uji normalitas untuk menguji apakah model regresi memiliki residual error yang terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov(K-S)dimana apabila koefisien K-S memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual error model terdistribusi normal. Persyaratan analisis yang diperlukan untuk penelitian yang menggunakan statistik inferensial, khususnya statistik parametrik. Uji Asumsi Klasik dapat dijelaskan melalui Uji Normalitas, dan Uji Multikolinieritas

## Pengujian Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai masing-masing koefisien regresi dengan (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n-1$  (Ghozali, 2021) :

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $P_{value} < \alpha = 0,025$ , maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $P_{value} > \alpha = 0,025$ , maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

## b. Uji F

bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan  $F < 0.05$  maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2018). Uji simultan F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

### **Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

Menurut Ghozali (2018), Koefisien determinasi R<sup>2</sup> untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> adalah nol sampai 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R<sup>2</sup> mendekati 1 berarti variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square (R<sup>2</sup>) pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali (2018) nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel – variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 Perangkat Desa pada 10 desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD di Pemerintahan Desa di Kecamatan Kanigoro yang berjumlah 50 responden. Sesuai dengan metode pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel jenuh maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada setiap desa yang berjumlah 10 desa. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 26 Juli 2023 – 29 Agustus 2023. Dari Kuesioner yang telah disebar kepada responden sebanyak 50, telah dikembalikan secara utuh sebanyak 50 kuesioner sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara utuh sesuai yang ditargetkan peneliti.

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Soal	Validitas		Ket
		R Tabel	r hitung	
Kompetensi Aparatur Desa	1	0,278	0,695	Valid
	2	0,278	0,844	Valid
	3	0,278	0,587	Valid
	4	0,278	0,837	Valid
	5	0,278	0,658	Valid
	6	0,278	0,844	Valid
Pemanfaatan Teknologi	1	0,278	0,712	Valid
	2	0,278	0,717	Valid
	3	0,278	0,782	Valid
	4	0,278	0,582	Valid
	5	0,278	0,705	Valid
	6	0,278	0,517	Valid
Partisipasi Masyarakat	1	0,278	0,795	Valid
	2	0,278	0,696	Valid
	3	0,278	0,911	Valid
	4	0,278	0,902	Valid
	5	0,278	0,868	Valid
	6	0,278	0,404	Valid
Akuntabilitas	1	0,278	0,870	Valid
	2	0,278	0,922	Valid
	3	0,278	0,881	Valid
	4	0,278	0,870	Valid
	5	0,278	0,702	Valid

Dari hasil uji validitas yang terdapat pada Tabel 3 dapat disimpulkan seluruh kuesioner mempunyai r hitung yang berada melebihi r tabel sehingga dapat dikatakan seluruh variabel memenuhi validitas.

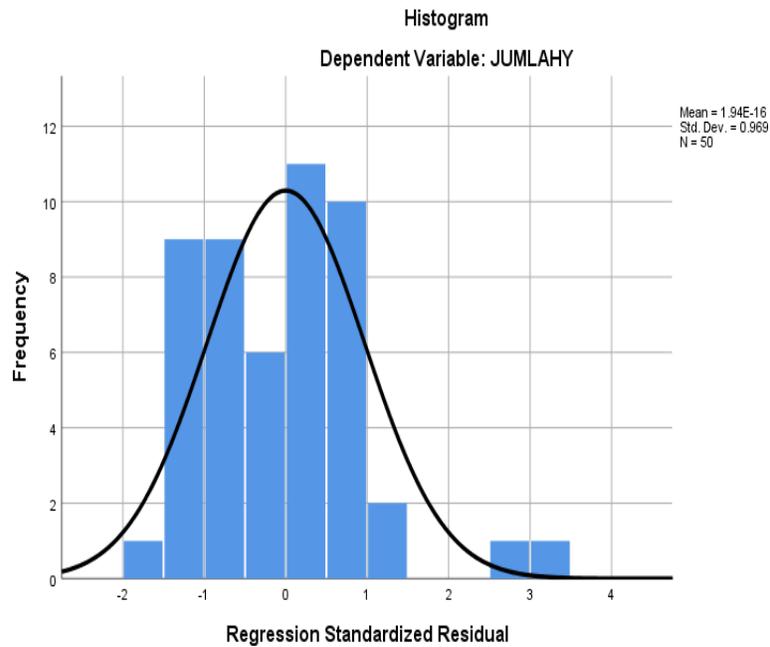
**Tabel 2 Uji reliabilitas**

Variabel	r hitung	Niai Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0,843	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi	0,729	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0, 851	0,6	Reliabel
Akuntabilitas	0, 905	0,6	Reliabel

**Tabel 3 Uji Asumsi Klasik**

N		5
Normal Parameters <sup>a,b</sup> Mean		.000000
	Std. Deviation	1.6775708
Most Extreme Differences	Absolute	.08
	Positive	.08
	Negative	-.06
Test Statistic		.08
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga data diatas dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji normalitas secara grafik histogram dan grafik normal probability plot dengan menggunakan SPSS versi 26 ditunjukkan dengan grafik di bawah ini:



**Tabel 4 Pengujian Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Variabel	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	.11	2.52		4.47	.00
JUMLAHX1	.31	.19	.38	1.59	.11
JUMLAHX2	.11	.15	-.15	-.74	.46
JUMLAHX3	.24	.13	.37	1.81	.07

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah : **Akuntabilitas (Y) = 0,112 + 0,310 Kompetensi Aparatur (X1) + 0,116 Pemanfaatan Teknologi (X2) + 0,243 Partisipasi Masyarakat (X3) + €**

Dari persamaan diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Konstanta sebesar 0,112 menyatakan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan moralitas individu bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka tingkat Akuntabilitasnya sebesar 0,112
- b. Koefisien regresi kompetensi aparatur sebesar 0,310 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan kompetensi aparatur sebesar 1%, maka akuntabilitasnya akan meningkat sebesar 0,310.
- c. Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,116 menyatakan bahwa setiap kenaikan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pada akuntabilitas sebesar 0,116.
- d. Koefisien regresi partisipasi masyarakat mempunyai nilai sebesar 0,243 yang berarti terdapat kenaikan akuntabilitas sebesar 0,243 jika terjadi peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 1%.

## Uji F

**Tabel 4.10 Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	78.60			26.208.740	.000 <sup>b</sup>
	Residual	137.89	4	2.99		
	Total	216.50	4			

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa hasil signifikansi yang dihasilkan adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 dan dapat diartikan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas.

## Uji T

1	(Constant)	.11	.25		.44	.00
	JUMLAHX	.31	.19	.38	2.59	.01
	JUMLAHX	-.11	.15	-.15	2.14	.04
	JUMLAHX	.24	.13	.37	2.81	.00

Berikut ini adalah rincian dari hasil uji t untuk menentukan hipotesis akan diterima atau ditolak.

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas Padatabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kompetensi aparatur sebesar 0,011. Artinya adalah hipotesis pertama atau variabel kompetensi aparatur dapat diterima dan dinyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

H2 : Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas Berdasarkan tabel nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi adalah sebesar 0,046. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis kedua atau variabel pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

H3 : Partipasi Masyarakat terhadap akuntabilitas Nilai signifikansi variabel partisipasi masyarakat pada tabel diatas menunjukkan angka 0,007 yang berarti hipotesis ketiga pada penelitian ini atau partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

### Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	l. Error of the Estimate
1	.603 <sup>a</sup>	.363		.321.731

Pada tabel tersebut nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada nilai Adjusted R-square. Penggunaan Adjusted R-square karena pada penelitian ini menggunakan variabel yang lebih dari dua. Nilai Adjusted R-square pada penelitian ini sebesar 0,322. Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu 32,2% variasi Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan 67,8% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel- variabel lain diluar model penelitian ini.

### Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh dari kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Kanigoro. Adapun uraian dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

#### Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas

Menurut peneliti hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas. semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seseorang maka orang tersebut akan semakin paham dengan apa yang sedang dikerjakannya dan akan dapat melakukan pekerjaannya dengan profesional. Hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indrayani et al., 2017), (Handayani & Setiawan, 2019), dan (Suryani & Suprasto, 2021)

#### Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas. Dapat diartikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat nilai dari pemanfaatan teknologi belum memastikan rendah tingginya Akuntabilitas yang terjadi di desa yang ada di Kecamatan Kanigoro. Pada penelitian ini pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh signifikan dikarenakan perangkat desa sudah mempunyai tingkat kesadaran dan tanggung jawab terhadap dana desa walaupun belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi yang ada.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil olah data statistic peneliti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh cukup signifikan terhadap Akuntabilitas. Hal ini berarti tingginya partisipasi masyarakat akan meningkatkan suatu akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alauddin, 2020) dan (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka pengelolaan dana desa juga akan semakin baik. Agar pemerintah tidak semena-mena menggunakan kekuasaannya, maka masyarakat seharusnya datang meminta pertanggungjawaban pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andika, I. B. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 340-350.
- Aparatur, P. K., Organisasi, K., Partisipasi, D., Terhadap, M., Pengelolaan, A., Desa, D., Kecamatan Batujajar, D., Giriani, M., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2021). The Effect of Apparatus Competence, Organizational Commitment, and Community Participation on the Accountability of Village Fund Management in Batujajar District Neng Dahtiah Dian Imanina Burhany. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480-492.
- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB Riau University*, Pekanbaru, Indonesia, 1(3), 2339-0492.
- Budiana, D. A., Said, D., & Sodiq, N. (2019). The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. *Scientific*

- Research Journal, 1(7), 10-20.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269- 1298.
- Evita Dewi, D., & Hari Adi, P. (2019). *TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG* (Vol. 03, Issue 02).
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Badiul. 2020. Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Hertanto, Eko. 2015. "Cara Menentukan Ukuran Sampel/ Responden Dalam Penelitian Kuantitatif ". Yogyakarta: UPN
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (n.d.). *PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*.
- Kharisma, F. T. (2021). Kompetensi aparatur ndesa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan TI dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaandana desa (studi kasus desa di kecamatan paciran kabupaten lamongan). *jurnal Ilmiah Ekonomi*, 40-44.
- mardiasmo. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ke-4. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurasfitri, W. A. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen dalam pengelolaan dana desa di kecamatan kabila bone. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 721- 736.
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). Penganggaran Sektor Publik. UB Press. Oliver, A. (2022). Kompetensi: Arti, Manfaat, Jenis, dan Cara Meningkatkan (Issue 1). <https://glints.com/id/lowongan/kompetensi-adalah/>
- Pahlawan, E. W. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172.

- Panjaitan, R. S. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi pemerintah desa, transparansi dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen*, 51-70.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020a). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020b). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 372–381. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2026>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023